

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro dan kecil beras berperan penting dalam pencapaian ketahanan pangan, dimana sebesar 90% produk pangan Kabupaten Klaten disediakan oleh UKM. Kinerja usaha mikro dan kecil pangan di Kabupaten Klaten masih dihadapkan pada berbagai macam hambatan, seperti ketersediaan tenaga kerja terampil, adopsi teknologi, permodalan dan juga pemasaran. Faktor penghambat ini didominasi oleh dua faktor yaitu kelembagaan dan pembiayaan. Penguatan kinerja usaha mikro dan kecil pangan di Kabupaten Klaten harus memperhatikan dua faktor penghambat utama tersebut, sehingga desain kelembagaan menjadi penting untuk menganalisis kinerja usaha mikro dan kecil pangan. Artikel ini memandang kelembagaan sebagai *rules of the game* yang hidup dan berjalan bersama realitas sosial pelaku usaha.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, dijelaskan mengenai pengertian usaha mikro dan kecil dan kriterianya, yaitu Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.

Kelembagaan dicirikan oleh tiga hal, yaitu: pemaksaan terhadap hak kepemilikan, membatasi tindakan-tindakan politisi, elite, dan kelompok-kelompok berpengaruh lainnya yang berupaya memperoleh keuntungan ekonomi tanpa prosedur yang benar, dan memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas. Pemikiran nomor pertama dan kedua mengarahkan desain kelembagaan pada hak kepemilikan atas produk pangan dan terciptanya equal opportunity dikalangan pelaku usaha mikro dan kecil pangan. Dalam teori ekonomi kelembagaan baru, untuk mempelajari kelembagaan maka teori biaya transaksi merupakan konsep penjelas yang sangat krusial, berkebalikan dengan asumsi neoklasik yang tidak mengakui adanya biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi. Biaya transaksi menjadi alat analisis untuk lebih mendalami permasalahan usaha mikro dan kecil pangan di Kabupaten Klaten, dimana semakin efisien biaya transaksi, maka desain kelembagaannya pun juga semakin efisien, dan sebaliknya. Menurut Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial.

Biaya transaksi usaha mikro dan kecil pangan timbul akibat adanya asimetri informasi, dimana pihak yang menguasai informasi cenderung

bersikap oportunistik sehingga menyebabkan munculnya biaya transaksi tinggi. Jika biaya transaksi terlalu tinggi, maka jual beli tidak akan terjadi dan ekonomi menjadi stagnan. Teori ekonomi kelembagaan juga diformulasikan oleh teori Coase (Coase Theorem) yang mengklarifikasi tentang biaya transaksi dalam teori ekonomi neoklasik. Coase men demonstrasikan bahwa inefisiensi dalam ekonomi neoklasik bisa terjadi bukan cuma akibat adanya struktur pasar yang tidak sempurna, melainkan karena adanya biaya transaksi.

Muncul dan perkembangan teori biaya transaksi berawal dari lingkup organisasi perusahaan, tetapi dipahami bersama bahwa asimetri informasi dan oportunistik yang menimbulkan biaya transaksi juga menjadi salah satu penghambat laju pertumbuhan ekonomi. Tantangan pembangunan ekonomi Kabupaten Klaten adalah bagaimana mengurangi biaya transaksi sehingga dibutuhkan desain kelembagaan yang tepat. Semakin tinggi biaya transaksi dan buruknya desain kelembagaan mengakibatkan kinerja usaha mikro dan kecil mengalami stagnasi. Menurut Williamson (1985), biaya transaksi adalah ongkos untuk menjalankan sistem ekonomi (the cost of running the economic system) dan biaya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan (costs to a change in circumstance). Kelembagaan menentukan transaksi, sekaligus mengatur kelompok atau agen ekonomi untuk mewujudkan kontrol kolektif terhadap transaksi.

Kelembagaan dan aransemen kelembagaan yang efisien dapat menurunkan biaya transaksi yang signifikan, hal ini hanya bisa dicapai dengan

menciptakan aturan main yang disepakati bersama oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam dunia bisnis.

Penguatan kinerja ekonomi Kabupaten Klaten perlu dilakukan melalui studi kelembagaan usaha mikro dan kecil. Buruknya desain kelembagaan dan tingginya biaya transaksi pada aktivitas pelaku usaha mikro dan kecil menghambat kinerja usaha mikro dan kecil dan berdampak pada tidak optimalnya kinerja perekonomian daerah. Dengan ini, perlu penelitian yang menganalisis pengaruh desain kelembagaan terhadap kinerja usaha mikro dan kecil, menganalisis pengaruh keberadaan biaya transaksi terhadap kinerja usaha mikro dan kecil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah biaya transaksi berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha beras di daerah rawan banjir Kabupaten Klaten?
2. Apakah kelembagaan berpengaruh positif terhadap kinerja usaha beras di daerah rawan banjir Kabupaten Klaten?
3. Apakah biaya transaksi dan kelembagaan berpengaruh positif terhadap kinerja usaha beras di daerah rawan banjir Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah biaya transaksi berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha beras di daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui apakah kelembagaan berpengaruh positif terhadap kinerja usaha beras di daerah rawan banjir Kabupaten Klaten.
3. Mengetahui apakah biaya transaksi dan kelembagaan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja usaha beras di daerah rawan banjir Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro dan kecil usaha beras di daerah rawan banjir. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teori kinerja organisasi.

2. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

- a. Usaha mikro dan kecil

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pada pelaku usaha mikro dan kecil, khusus dalam perdagangan beras dalam meningkatkan kinerja.

b. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai teori- teori tentang pengaruh dari biaya transaksi, aspek kelembagaan terhadap kinerjausaha mikro dan kecil beras di daerah rawan banjir.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk mengetahui tentang pengaruh biaya transaksi dan aspek kelembagaan dan hal-hal apa saja yang mungkin dapat mempengaruhinya terhadap kinerja usaha mikro dan kecil usaha beras di daerah rawan banjir.